

CATATAN TENTANG TOL LAUT JOKOWI

Budi Santoso¹, Harun Umar²

¹Guru Besar/Mantan Sesjen Wantannas

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sedang Menyelesaikan Disertasi Program S3 Pada Pascasarjana Doktor Ilmu Politik, Unas.

Abstract

A note on Tol Laut Jokowi is presented covering the economic potensial of the sea, maritime security history of Indoensian Maritime in brief. Overlapping of authorizations in the sea manajerial usies by the government institutions namely : Bakamla, Maritime ministry and Fisheries, Navy, and the state police should not create conflict of interest if they can be coordinated signergitically diplomatic concerns should be taken cares related to the China's concept on South China Sea, in prospect of UNCLOS.

Keywords : *Tol Laut Jokowi, economic potensial sea security, overlapping authorizations & government institutions.*

Pendahuluan

Tol laut yang dimaksud merupakan infrastruktur berupa pelabuhan dan transport laut. Tidak seperti tol jalan darat, semua perairan yang tidak terlalu dangkal di laut dapat dilalui kapal. Sehingga tol laut itu jalur-jalur transportasi laut tertentu dengan pelabuhan-pelabuhan yang tertentu beroperasi secara reguler. Kunci dari tol laut adalah konektivitas melalui jalan laut.

Tol laut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritim, menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional. Presiden Jokowi menyatakan, dibanding negara yang lain biaya transportasi kita memang 2,5-3 kali lebih mahal. Untuk itu pembangunan tol laut dari barat ke timur, timur ke barat, yang menghubungkan konektivitas antara pulau dengan pulau, dapat menurunkan biaya transportasi sehingga biaya logistik juga akan turun.

Kata maritim berkaitan dengan laut, pelayaran, perdagangan dan pertahanan laut. Laut sendiri ada yang menjadi bagian teritorial suatu negara , ada yang merupakan laut bebas.

Negara Maritim adalah negara yang menggunakan potensi laut (transportasi, sumber daya alam, keamanan) sebagai sumber daya nasionalnya. Dengan tol laut Jokowi, Indonesia yang memiliki wilayah laut

yang terluas didunia akan bangkit menjadi negara maritim. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara , meskipun wilayah lautnya sangat sedikit, tapi mereka dapat tampil sebagai negara maritim yang kuat.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bila dapat memanfaatkan potensi lautnya , akan menjadi negara yang kuat dan makmur. Potensi itu dilukiskan oleh jumlah pulau yang melebihi 17000, dengan letak pada posisi silang lautan Hindia dan lautan Pacific, sekaligus sebagai jembatan antara dua benua Asia dan Australia. Posisi geografinya membentang dari 6°08' lintang utara sampai 11°15' lintang selatan, dari 94°45' bujur timur sampai 41°05' bujur timur. Luas daratan sekitar 1,8 juta km², luas perairan laut sekitar 7,9 juta km², termasuk zona ekonomi eksklusif. Luas laut teritorial lebih dari 3 juta km², luas ZEE lebih dari 2,7 juta km² , panjang pantai seluruh pesisir, sekitar 81 000 km Banyaknya gunung berapi yang masih aktif (sekitar 400) memberikan sumbangan bagi kesuburan tanah , bahkan dapat menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Iklimnya yang tropis membagi menjadi dua iklim hujan dan kering. Kondisi itulah yang memerlukan konektivitas laut karena pulau-pulau terpisah oleh laut disekitarnya. Sebagai pembanding permasalahan maritim, dapat dilihat dari panjang pantai. Panjang pantai Indonesia 54.716 km (bandingkan dengan Timor Leste 228 km, Malaysia 1.782 km, Papua New Guinea 820 km). Kondisi maritim kita saat ini hanya 40% transport laut domestik yang dilakukan oleh orang Indonesia. 5% dari ekspor dilakukan oleh kapal domestik, sedangkan sisanya yaitu 95% oleh kapal asing.

Dalam sambutannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan harapan saya tentang peran KTT Asia Timur kedepan,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di KTT Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11/2015).

Dengan berkembangnya tol laut dan kemaritiman Indonesia, maka akan tumbuh gagasan perlunya a)Doktrin Maritim Nasional, b).Politik Luar Negeri Maritim, c).Ekonomi Maritim, d).Budaya Maritim dan e).Politik Pertahanan dan Keamanan Maritim

Potensi Laut

Betapa manfaat laut bagi transportasi perdagangan , seorang ahli geopolitik dan ahli dalam strategi kelautan bernama Thayer Mahan menyatakan : “Control of the sea by maritime commerce . and naval supremacy means predominant influence in the world ... (and) is the chief among the merely material elements in the power and prosperity of nations.” Demikian juga Sir Walter Raleigh menyatakan " he that commands the sea,

commands the trade, and he that is the lord of the trade of the worlds is the lord of the weath of the world. Memang kekuatan laut itu sangat besar apabila bertumpu pada kekuatan angkatan laut dibantu coastguards, industri maritim baik industri rakyat maupun industri militer.[1] . Berdasar perkiraan KADIN (2015) potensi laut dapat diproyeksikan mampu menyumbang 171 miliar dollar AS (asumsi kurs Rp12.000,- per dollar AS) dengan rincian (dalam triliun rupiah) perikanan sebesar 380 , pesisir 670, bioteknologi 480, wisata bahari 24, minyak bumi 252, transport laut 240 [2]

Keamanan Laut

Keamanan di laut adalah jaminan yang perlu diberikan oleh pemerintah dalam penegakan hukum dan kedaulatan. Ancaman terhadap sovereinitas negara merupakan ancaman kedaulatan yang harus ditangani oleh TNI cq TNI AL Ancaman ini dapat berbentuk serangan musuh dari luar, juga dari dalam negeri, pernyataan memerdekakan wilayah melepaskan diri dan memproklamirkan sebagai negara merdeka. Sedangkan ancaman dalam keamanan dapat berupa teroris, pembajakan, illegal fishing, illegal logging, human trafficking dsb. Bisa juga berupa kejahatan terorganisi lintas nasional seperti penyelundupan imigran, narkoba, pencurian kekayaan alam, polusi dan dumping.

Sejarah Kemaritiman Indonesia

Tahun 1957 terjadi Deklarasi Djuanda, yang merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia, untuk menyatakan bahwa laut teritorial adalah bagian dari keutuhan wilayah negara kepulauan Indonesia. Pada tahun 1960, Presiden Sukarno membentuk Dewan Maritim melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1960 Tanggal 30 Agustus 1960. Pada tahun 1996 Presiden Suharto membentuk Dewan Kelautan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1996 Tentang : Dewan Kelautan Nasional. . Pada tahun 1999, membentuk Dewan Maritim Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1999 Tentang Dewan Maritim Indonesia. . Pada tahun 2007, membentuk Dewan Kelautan Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia. Setelah terbentuknya BAKORKAMLA dibentuk pula BAKAMLA

Tumpang Tindih Kewenangan?

Sangat sulit mengamankan kepentingan nasional di laut kecuali ada penataan konstruksi dan kewenangan antar lembaga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga penjaga laut dan pantai. Pasal 276 kebijakan ini mengatur, lembaga

itu perlu dibentuk untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut.

Berdasar UU no 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk untuk penagakan hukum di laut. TNI Angkatan Laut berdasar UU 34 tahun 2004, selain melaksanakan tugas pertahanan, juga bertugas menegakkan hukum, menjaga keamanan wilayah di laut. Bahkan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP, penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sementara berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 43 tahun 2009, TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan juga berhak atas kasus tersebut. Adanya tumpang tindih ini memerlukan pembahasan untuk penyelesaian lebih lanjut. Tumpang tindih tersebut tidak hanya terjadi antara POLRI DAN TNI AL tetapi juga dengan Lembaga lain. Untuk perlu disajikan tugas dan wewenang Lembaga-lembaga terkait dengan kelautan. Berikut adalah Lembaga-lembaga terkait

Bakorkamla

Sebagai lembaga koordinasi, Bakorkamla hanya bertugas sebatas pengkoordinasian menyangkut tugas-tugas penegakan hukum yang tercakup dalam kewenangan instansi-instansi yang tercakup dalam perundang-undangan masing-masing dan tidak memiliki otoritas memaksa, sehingga pelaksanaan pengamanan wilayah maritim menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dengan terbentuknya BAKAMLA, maka fungsinya beralih ke BAKAMLA. Saat ini, Bakamla tidak berada langsung dibawah Kemenkopolkum, sebagaimana Bakorkamla, yang Ketuanya adalah Menkopolkum. Bakamla adalah organisasi sipil, dan tidak termasuk dalam daftar jabatan yang diizinkan oleh Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI untuk diawaki oleh personil TNI aktif.

Oleh karena menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang merupakan landasan hukum pembentukannya, bahwa Bakamla "tidak perlu" dilengkapi dengan kapal, maka semua aset Bakamla saat ini yang berhubungan dengan kapal, seperti, dermaga, kapal, radar dll menjadi ilegal. Bagi TNI AL pun, tidak ada alasan untuk menghibahkan kapal kepada Bakamla, karena tidak ada landasan hukumnya. Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang

Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KKP mempunyai fungsi :

FUNGSI:

- 1). Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- 7). Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
- 8). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
- 9). Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan
- 10). Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

TNI Angkatan Laut

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 9, Angkatan Laut bertugas: 1).melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; 2).menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; 3).melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; 4).melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; 5).melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Bakamla

Perpres No. 178/2014, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- 2) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- 3) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- 4) Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- 5) Mmemberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- 6) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

- 1) Melakukan pengejaran seketika;
- 2) Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- 3) Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kepolisian Negara

Berdasar UU No. 2 tahun 2002 salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hal asasi manusia Kepolisian menerangkan mengenai peran polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai tugas pokok Polri diterangkan didalam pasal 13, yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum; dan,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Paradigma

Terjadi perubahan paradigma dari 1).Ekonomi berbasis daratan menjadi berbasis darat laut, udara 2).penguatan pusat ekonomi untuk melebar dan menarik daerah sekitarnya menjadi pusat-pusat ekonomi baru karena didukung oleh infrastruktur baik tol darat maupun tol laut, 3).kawasan barat dan timur Indonesia menjadi kawasan depan dan kawasan dalam, 4).konsep wawasan nusantara, menjadi realisasi / implementasi konsep wawasan nusantara, 5).the trade follow the ship menjadi the ship follow the trade, 6).dari perdagangan berdasar market demand, menjadi market demand diciptakan oleh technology push.

Tantangan Terhadap Konsep Kelautan China

Perkembangan ekonomi yang menakjubkan di Cina didukung oleh kemampuan teknologi dalam semua lini. Perkembangan ekonomi ini pada gilirannya dapat menggeser bahkan mengganggu keseimbangan hubungan antar negara yang ada. Dengan kekuatan ekonomi, militer dan teknologi, Cina mulai mengusik, integritas teritorialnya dengan mengklaim wilayah Taiwan, Tibet dan Laut Cina Selatan. Pertumbuhan perekonomian selalu memerlukan bahan dasar alami, energi dan pasar. Terjadilah kompetisi dagang bahkan menjadi perang dagang. Penyusupan ide tidak lagi selalu pada ideologi komunis tapi lebih pada penyusupan perdagangan, melalui penyusupan dalam berbagai KKN dengan para pengambil keputusan negara tetangga/ negara lain demi mendapatkan keamanan pasokan bahan industri dan pemasaran hasil industri. Meskipun lahan daratan masih cukup luas seara

perhitungan untuk menampung jumlah penduduk terbesar di dunia (lebih satu milyar), namun daerah kering yang tidak subur terlalu mahal untuk dapat memberikan prospek kehidupan. Laut masih lebih memberikan prospek yang lebih baik akan sumber daya alam. Oleh sebab itu, Cina mulai mengklaim, laut Cina Selatan. Philipina sebagai contoh mengklaim 90 % wilayah lautnya oleh Cina, dan hampir seluruh Asean terkena klaim tersebut. Indonesia yang memiliki sumber gas alam besar di Natuna terkena klaim sebagian wilayah lautnya, bahkan pernah terjadi insiden di laut Natuna. Itulah bentuk agresi baik bersifat simetrik maupun asimetrik. Kemampuan teknologinya membangun cyber warfare bukan saja Cina berani menantang ASEAN tapi bahkan juga Amerika Serikat. Benturan kepentingan pasar dengan tarif pajaknya menimbulkan perang dagang dengan Amerika Serikat. Dengan military built up di kepulauan Spratley, memberikan petunjuk bahwa Cina benar-benar mengklaim laut Cina Selatan sebagai Wilayah Teritorialnya

Kanal Kra Isthmus

Melalui diplomasi bilateral dengan pemerintah Thailand, Pemerintah Republik Rakyat China sedang merencanakan pembangunan sebuah kanal di Kra Isthmus Thailand sepanjang 100 kilometer. Kanal ini akan menghubungkan Laut China Selatan, Teluk Thailand dan Samudera India. Dengan kanal itu, rute kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan China tak perlu lagi melewati Selat Malaka, bahkan dapat mempersingkat perjalanan sejauh 1.000 kilometer, dan menghindari selat Malaka yang banyak pembajakan dan kabut dari kebakaran hutan. Jalur baru ini bila terealisasi dapat merupakan ancaman tetapi juga dapat menjadi komplemen bagi program tol laut Indonesia.

Meskipun secara internasional telah disepakati pengaturan laut , namun keyakinan suatu negara untuk mengklaim wilayah laut dan teritorial suatu daerah dapat termotivasi oleh kepentingan nasionalnya didasari alasan kekuasaan secara historis sebelumnya (kekuasaan kerajaan, kekuasaan penjajahan dll). Pengaturan secara internasional dapat dilihat dari UNCLOS (United Nations Code law on Sea).

UNCLOS 1982

- Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada 30 April 1982
- Telah diratifikasi oleh 149 negara
- Berisi mengenai penetapan batas-batas terluar dan garis batas antar negara dari berbagai zona maritim seperti : Perairan Dalam, Laut teritorial, Selat, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas/Lepas, dan Kawasan.

Praktek di Indonesia setelah adanya UNCLOS 1982

- Diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no. 17/th. 1985
- Aturan di dalam UNCLOS untuk menentukan batas wilayah maritim, yaitu :
 1. 12 mil untuk laut teritorial (Pasal 4)
 2. 24 mil untuk zona tambahan (Pasal 33)
 3. 200 mil untuk ZEE dan landas kontinen (Pasal 57 dan 76 (1))
 4. Dan dalam kondisi tertentu 350 mil untuk landas kontinen

Simpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan perlunya memahami permasalahan kelautan dengan segala perangkat peraturannya, tidak perlu kuatir akan adanya tumpang tindih, karena justru wewenang yang kelihatannya tumpang tindih dapat menjadikan berkembangnya sinergi lembaga-lembaga terkait, selama ada pembagian batas kewenangan. Dalam penegakan hukum misalnya ada pembagian kewenangan Polri sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan kehakiman sebagai pemutus perkara, Kementerian Hukum dan HAM penyedia LAPAS . Begitu pula perlu segera dilakukan pembagian kewenangan di laut antara kepolisian, TNI AL, BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Otonomi Daerah.

Hal tersebut tidaklah mungkin membuat suatu kesatuan lembaga otoritas seperti Otoritas Batam, karena keamanan laut mempunyai dua sisi keamanan yaitu penegakan hukum oleh Polisi dan perangkat pengak hukum lainnya, dan penegakan kedaulatan negara dan wilayah oleh TNI yang sisinya berbeda

Acuan

Ilias Iliopoulos PhD, Professor at the Hellenic Staff College Baltic Security & Defence Review Volume11, Issue2, 2008, http://www.baltdefcol.org/files/files/BSDR/BSDR_11_2.pdf

<http://beritadaerah.co.id/2015/03/18/rancangan-tol-laut-dalam-rpjmn-2015-2019/>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/07/1150184/Inilah.Penjelasan.Tol.Laut.yang.Akan.Dibangun.Jokowi, JAKARTA, KOMPAS.com>

<https://bappenas.go.id/files/Pengembangan%20Tol%20Laut%20Dalam%20Rajam%20PJM%202015-2019%20Dan%20Implementasi%202015.pdf>

Sea Power and China's Strategic Choices Zhang Wenmu China Security, Summer 2006, pp.17 - 31 © 2006 by the World Security Institut

Security of seafarers and fishers Security of seafarers and fishers Maritime Security and Safety UNITAR/DOALOS Briefing 17 October 2007 Michele Ameri Michael Shewchuk
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_25years/07unitar_doalos_2007.pdf

<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP59.pdf>
Force Modernisation trends in Southeast Asia, Andrew Tan, Institute Defence and Strategic Studies, Singapore

<http://thediplomat.com/2011/05/aseans-china-challenge/>

Rencana Tol Laut Jokowi



